

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DI KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG

OLEH:
SILFANUS EFFENDI
NIM E11112004

Program Studi Pembangunan Sosial/Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016
E-mail: ecilffanus@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini yang *pertama*, untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat mengenai program pemberdayaan masyarakat mandiri di Desa Balai Pinang. *Kedua*, untuk menggambarkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat mandiri. *Ketiga*, untuk menganalisis kendala-kendala partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat mandiri. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program pemberdayaan masyarakat mandiri, karena program pemberdayaan masyarakat mandiri tersebut kurang disosialisasikan oleh pemerintah desa dan SDM masyarakat yang kurang. *Kedua*, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan program pemberdayaan masyarakat mandiri masih kurang: Misalnya kurang pelibatan masyarakat dalam rapat, dalam kerja melaksanakan pembangunan dalam program pemberdayaan dan yang aktif adalah staf-staf desa. *Ketiga*, kendala partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat mandiri di pengaruhi beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi, pendidikan yang rendah, faktor mata pencarian masyarakat, jenis kelamin, pengetahuan, status kependudukan, pemerintah desa. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat mandiri pemerintah setempat diharapkan dapat mensosialisasikan program tersebut lebih secara rutin supaya masyarakat paham akan program tersebut dan dapat berpartisipasi dengan baik. Dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan.

Kata-kata Kunci: Partisipasi, Pemberdayaan, Masyarakat Mandiri.

PUBLIC PARTICIPATION IN THE FRAMEWORK FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN SIMPANG HULU KETAPANG

Abstract

The purpose of this study is the first, to find out how citizens of the community empowerment program independently at village of Balai Pinang. Second, to describe the forms of public participation in community development programs independently. Third, to analyze the constraints of public participation in community development independently. This research was descriptively by qualitative analysis. Research shows that first, a lack of understanding of the community the independent community empowerment programs, because the independent community empowerment program less socialized by the village government and society less human resources. Second, public participation in the planning, implementation and utilization of independent community empowerment program is still lacking: for example less community involvement in meetings, in carrying out development work in the empowerment and active program is the staff of the village. Third, the constraints of participation people in the community empowerment independently influenced several factors such as the lack of public awareness of the importance of participating, low education, factors of livelihoods, gender, knowledge, status of residence, the village government. To increase public participation in community development programs independently The local government is expected to disseminate these programs more regularly so that people will understand the program and be able to participate well. From the planning, implementation, and utilization.

Keywords: Participation, Empowerment, Independent Community.

A. PENDAHULUAN

Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (Rahardjo, 2006: 38-39). Dari sisi bidang yang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan (Hartanto:2008). Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika ini pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Memosisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat (Rahardjo, 2006). dalam permasalahan ini lebih memfokuskan pada pemberdayaan

masyarakat mandiri, serta berbagai strategi pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan diarahkan pada semua sektor dan di semua wilayah, termasuk di perdesaan. Pembangunan desa dan pemberdayaan penting dilakukan mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di pedesaan. Pembangunan desa dan pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga desa. Sehubungan dengan itu, pembangunan yang dilakukan harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat desa itu sendiri (Hagul, 1992). Pada dasarnya, pembangunan masyarakat desa memiliki dua sasaran, yaitu sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Sasaran jangka pendek yaitu merangsang masyarakat untuk mengambil tindakan segera dan nyata, sedangkan sasaran jangka panjang yaitu membentuk rasa kepercayaan terhadap diri sendiri (Lowa, 1985). Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat Desa sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program-program pembangunan desa, maka dapat dipastikan bahwa partisipasi masyarakat akan dapat diperoleh jika program-program dalam pembangunan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Selanjutnya dapat dipastikan pula bahwa

tujuan pembangunan itu akan tercapai pula. Partisipasi oleh Mubyarto (Ndraha, 1990) diartikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Berbicara tentang keberhasilan pembangunan desa, Desa Balai Pinang di Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang merupakan desa yang pembangunannya tergolong lebih maju dibandingkan desa-desa lainnya di Kecamatan Simpang Hulu.

Memang keberadaan Desa Balai Pinang sebagai pusat Kecamatan Simpang Hulu memberikan peluang yang lebih bagi pengembangan desa dan Pemberdayaan tersebut, tetapi tanpa partisipasi masyarakat desa tersebut, pembangunan di Desa Balai Pinang tidak akan berjalan dengan baik. Dengan demikian, menarik untuk diteliti tingkat partisipasi masyarakat Desa Balai Pinang dalam pembangunan desa dan kesesuaian program-program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat desa tersebut. Disamping itu, dengan melihat perbedaan karakteristik individu sebagai elemen masyarakat, penting juga dikaji ada tidaknya pengaruh karakteristik individu terhadap tingkat partisipasinya dalam pembangunan. Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kecamatan Simpang Hulu. pembangunan

desa yang dipilih untuk dikaji adalah bidang sosial ekonomi, sosial budaya, teknologi karena ketiga bidang pembangunan ini merupakan bidang pembangunan desa yang sangat berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, khususnya pembangunan bidang sosial ekonomi, sosial budaya, teknologi sebagai titik awal untuk menganalisis penyebab perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut.

Masyarakat adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kegiatan pembangunan, baik itu dampak positif ataupun negatif. Dampak ini dapat terjadi dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun lingkungan. Kesejahteraan masyarakat akan mendorong peningkatan daya beli, sehingga memperkuat daya serap pasar terhadap output pembangunan Desa. Sedangkan kelestarian faktor-faktor pembangunan serta kelancaran proses proses pelaksanaan yang terjaga akan meningkatkan efisiensi proses pembangunan dan pemberdayaan. Dua faktor tersebut akan meningkatkan partisipasi dalam pemberdayaan desa yang mempunyai kopotensi peningkatan pembangunan, dan dengan sendirinya meningkatkan kemampuan pembangunan dan pemberdayaan desa serta

mengalokasikan sebagian dari alokasi dana desa (ADD) untuk membiayai berbagai pembangunan desa di tahun-tahun berikutnya (Hertanto, 2008).

Partisipasi dan pelaksanaan program-program pemberdayaan dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan periodik. Kegiatan yang dilakukan senantiasa mengedepankan persoalan-persoalan vital yang dihadapi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraannya. pemberdayaan merupakan tujuan yang harus dilaksanakan oleh desa serta kepedulian untuk meningkatkan peran desa dalam komunitas pemberdayaan masyarakat. Karena, keberadaan sebuah desa tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat.

partisipasi dan pemberdayaan akan terus berkembang seiring dengan dinamika yang terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. isu-isu sosial tersebut berkembang sebagai wujud dari adanya perubahan dalam cara pandang hidup masyarakat yang harus direpson oleh pemerintah. Ketidak mampuan desa dalam menangkap isu sosial yang berkembang di masyarakat akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Menurut Giddens (dalam Budimanta et al.,2008:14) dampak dari globalisasi yang terjadi dewasa ini, tidak hanya mempunyai dimensi ekonomi saja, akan tetapi juga mempunyai dimensi politik, teknologi, dan

budaya. Pemikiran tersebut juga akan mempengaruhi cara berfikir kalangan usahawan dalam memandang strategi usahanya. pemberdayaan tidak lagi di pandang sebagai bagian luar dari masyarakat tetapi desa sudah menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi dan pelaksanaan program Pemberdayaan merupakan realisasi dan aktualisasi dari upaya desa untuk terus mengajak masyarakat untuk dalam meninjau pembangunan.

Masyarakat dan alam lingkungan hidup merupakan sumber utama faktor-faktor produksi terpenting bagi kegiatan dan eksistensi desa. Tanpa masyarakat dan alam lingkungan hidup, maka desa tidak akan pernah eksis dan mampu berkembang. Desa dapat tumbuh dan berkembang karena adanya faktor-faktor produksi tersebut. Karena itulah desa memiliki tanggungjawab untuk memberdayakan atau terhadap keberadaan masyarakat dan alam lingkungan (Marlia dan Hidayat, 2008).

Pemberdayaan adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh desa (sesuai kemampuan desa tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah desa terhadap masyarakatnya yang harus di berdayaan. Contoh bentuk tanggungjawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada dalam desa tersebut (Akbar, 2012).

Penerapan pembangunan dan pemberdayaan, umumnya desa akan melibatkan partisipasi masyarakat, baik sebagai objek maupun sebagai subjek program yang dilaksanakan oleh desa. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah salah satu pihak yang cukup berpengaruh dalam menjaga eksistensi suatu desa.

Masyarakat adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh desa, baik itu dampak positif ataupun negatif. Dampak ini dapat terjadi dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun lingkungan (Supomo dalam Marlia dan Hidayat, 2008).

program pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang sangat berkaitan dengan partisipasi masyarakat, suatu program desa yang mempunyai implementasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam perencanaan program demi kepentingan kalangan masyarakat khususnya di Desa Balai Pinang, dalam hal ini program yang dirancang dan gagaskan yaitu:

- Penyaluran pipa air bersih
- Memperbaik infrastruktur keakses jalan pemhubungan desa
- Memberi bantuan kewirausahaan melalui kelompok tani
- Bantuan dalam program pendidikan.
- Bantuan sosial untuk acara wajib tahun bagi masyarakat
- Membuat pembangkitan tenaga listrik.

Gambaran program yang di utamakan oleh desa berdasarkan program desa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Dalam hal ini partisipasi masyarakat terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi, dimana tiga tahap ini saling berkaitan mulai dari perencanaan yang dilaksanakan dengan menuangkan ide-ide yang sifatnya penting. Partisipasi dalam hal ini hanya membantu menyumbangkan gagasan, tahap pelaksanaan dimana masyarakat ikut berperan dalam melaksanakan suatu kegiatan dan terlibat didalam untuk menyumbangkan tenaga dalam bentuk gotong royong, sertap tahap evaluasi dimana didalam hal ini dapat di lihat keberhasilan tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan, atau tahap evaluasi adalah hasil dari semua kegiatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “partisipasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat madiri di Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.

B. TIJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Partisipasi

Partisipasi masyarakat sangat perlu dalam pembangunan, karena masyarakatlah yang tahu apa yang mereka butuhkan dan permasalahan apa yang mereka hadapi. Pembangunan sebaiknya direncanakan oleh masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pemanfaatan. Ini artinya masyarakat tidak hanya sebagai penikmat pembangunan tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan. Koentjaraningrat (2002:79), mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan ada dua tipe yaitu : (1) Partisipasi dalam aktivitas- aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus. (2) Partisipasi individu diluar aktivitas- aktivitas bersama dalam pembangunan. Pendapat Koentjaraningrat tersebut dengan jelas mengatakan bahwa tipe pertama masyarakat diajak, diperintah bahkan diminta oleh kemintraan perusahaan untuk menyumbang tenaga bahkan material terhadap pembangunan yang biasa bersifat

fisik. Sedangkan tipe yang kedua tidak ada paksaan ataupun perintah tetapi atas dasar kemauan mereka sendiri. Selanjutnya Adisasmita (2006:35) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan masyarakat. Jadi partisipasi erat kaitannya dengan pembangunan, tanpa partisipasi aktif dari masyarakat maka pembangunan pasti tidak akan berjalan dengan lancar dan bias jadi program tersebut malah tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian halnya menurut Heller (dalam Huridkk, 2008:74) partisipasi adalah dimana individu turut ambil bagian dalam pembuatan keputusan terhadap suatu lembaga, program dan lingkungan yang mempengaruhinya. Sementara Isbandi (2007:27), mengatakan partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses identifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang mencari solusi untuk menangani suatu masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan melibatkan masyarakat dalam proses mengevaluasi setiap perubahan yang terjadi didalam masyarakat. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan, namun

masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. tanpa partisipasi masyarakat disetiap pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung dalam sebuah bangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Sedangkan menurut Mubyarto (dalam Sari 2012:6), mengatakan partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya sebuah program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa harus mengorbankan kepentingan diri sendiri. Hal ini berarti dalam suatu pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan kegiatan bersama dalam kegiatan perusahaan terhadap perencanaan, terhadap pelaksanaan dan terhadap pemanfaatan program tersebut untuk masyarakat, masyarakat yang bersedia berpartisipasi tentunya masyarakat yang sangat mendukung berhasilnya program pembangunan yang dijalankan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus dilakukan dari tahap kesepakatan bersama mulai dari perencanaan dan pelaksanaan. Dengan demikian program pembangunan dapat berjalan lancar Mikkelsen (1999:64) membagi partisipasi menjadi 6(enam)

yaitu: (1) partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. (2) Partisipasi adalah kesadaran (membuat peka), masyarakat. (3) Partisipasi adalah sukarela oleh masyarakat (4) partisipasi adalah suatu proses yang aktif. (5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, melaksanakan monitoring proyek agar memperoleh informasi dalam konteks local dan dampak sosial. (6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri kehidupan dan lingkungan mereka.

Setiap pembangunan masyarakat sangat dibutuhkan dalam partisipasi karena tanpa partisipasi dari masyarakat program pembangunan tidak akan berjalan dengan baik, selain itu partisipasi masyarakat juga akan membawa kemajuan dalam pembangunan dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung, maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

2. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya kekuasaan

(power) kepada pihak yang lemah (powerless) , dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful) sehingga terjadi keseimbangan menurut Djohani, 2003, (dalam buku Oos M. Anwar 2013:49). begitu pula menurut Rappapor 1984, (dalam buku Oos M. Anwar 2013:49) pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Pengertian pemberdayaan (empowerment) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya.

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. dalam pemberdayaan terkandung proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri . menurut Parsons (1994), pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupan dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Selanjutnya menurut Ife

(1995) pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan menentukan masa depan mereka, serta

Berpasipasi mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. secara lebih rinci Slamet (2003), menekankan bahwa akekat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan inisiatif. sedangkan indikator pemberdayaan menurut Suharto (2011) paling tidak memiliki empat hal, yaitu: merupakan kegiatan terencana dan kolektif, mampu memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas. dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna: dorongan atau motivasi, bimbingan atau pendamping dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju

prilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat individu dan masyarakat. menurut Pranarka dan Muljarto (1996) pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara, dan tata nilai dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud didalam kehidupan politik, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya.

Partisipasi dalam pemberdayaan dan pembangunan ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Pertama wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat

seberapa besar prosentase keberhasilan program Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya. Dari pendapat diatas dapat dikemukakan bahwa macam-macam partisipasi dapat bersifat.

- a) Partisipasi dalam proses perencanaan/pembuatan keputusan (*participation in decision making*).
- b) Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementing*).
- c) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.
- d) Partisipasi dalam evaluasi (*participation in benefits*).

Selanjutnya berbeda dengan pendapat, Chohen dan Uphoff, Tjokroamidjojo (1996:207) juga mengatakan bahwa ada 3 (tiga) dimensi untuk mewujudkan partisipasi masyarakat.

- a) Partisipasi dalam tahap perencanaan
- b) Partisipasi dalam tahap pelaksanaan
- c) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan.

Masyarakat bukan hanya diperlukan namun sudah menjadi tujuan utama dari pembangunan itu sendiri, dimana dengan adanya pembangunan diharapkan adanya kesempatan, kesediaan

kemampuan kerja anggota masyarakat didalamnya.

partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dapat berupa mengeluarkan pendapat, gagasan, ide-ide atau peran serta dalam rangka pelaksanaan program dalam pembangunan. Pendapat masyarakat sangat perlukan guna mendukung program yang sedang dijalankan, sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dapat berupa keterlibatan aktif masyarakat terhadap program itu sendiri seperti membantu dalam pembangunan gedung atau membantu dalam pelaksanaan pelayanan. Akan tetapi, jika masyarakat tidak biasa terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program pembangunan tertentu, mereka dapat juga berpartisipasi secara tidak langsung misalnya dengan memberikan bantuan berupa uang. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dapat berupa masyarakat menjaga fasilitas yang diberikan dan dimanfaatkan program pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri.

Adapun program pembangunannya, harus memperhatikan kepentingan masyarakat, selain itu dalam sebuah perencanaan program juga harus mendengarkan aspirasi masyarakat agar program yang nantinya dijalankan sesuai

dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam sebuah pembangunan, gerakan pembangunan kearah yang lebih baik akan tercapai. Beberapa pengertian partisipasi atas, menjelaskan dengan jelas bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif seseorang atau kelompok orang secara sadar dalam sebuah program pembangunan mulai dari perencanaan program, pelaksanaan program dan pemanfaatan program.

Partisipasi memiliki banyak penekanan makna. Beberapa definisi disajikan, mulai dari 'penekanan pada rakyat yang memiliki peran dalam pembuatan keputusan' (Uphoff dan Cohen), 'rakyat yang memiliki kendali terhadap sumber daya dan institusi' (Pearse dan Stifel), hingga 'kemampuan rakyat dalam memengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya' (Paul), (dalam Jim Ife 2008:296-297). pembangunan merupakan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas hidup, kata kunci dari konsep pembangunan adalah perubahan, pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan, meningkatkan martabat dan harga diri, Susanto,(dalam Oos M. Anwas 2013 : 41)

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial.

Menurut Sugiyono (2003:45) Penelitian kualitatif, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang membuahkan berbagai penemuan yang tak dapat dicapai dan diperoleh dengan menggunakan data statistik seperti layaknya apa yang digunakan di dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, yang digunakan di dalam metode penelitian adalah apa yang ada di dalam masyarakat, sejarah, tingkah laku, aktivitas sosial dan juga beberapa hal di dalam masyarakat yang lain.

Metode yang dipakai ini adalah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan akan apa yang ada di balik segala hal yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Terkadang apa yang terjadi tersebut dianggap sebagai sebuah hal yang sulit untuk dimengerti sehingga membutuhkan

data penjas untuk lebih memahami hal tersebut.

Menurut Nawawi (1998 : 64). Penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagaimana adanya. Dengan demikian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif.

1. Subyek dan Objek penelitian

Subyek penelitian adalah sumber tempat kita memperoleh keterangan penelitian. Supaya penelitian ini lebih akurat dan mendekati kebenaran maka pada penelitian ini akan digunakan subyek sebagai sumber datanya. Dalam penelitian ini penentuan subjek penelitian menggunakan cara *purposive sampling* yaitu menentukan informan berdasarkan tujuan atau keperluan yang ditetapkan peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2003:90). Adapun subyek penelitian ini terdiri dari : Kepala Camat, Kepala Desa dan jajaran pemerintah Desa, di Desa balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, Selain itu, penulis juga menggunakan Masyarakat atau pemantau pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mandiri sebagai subyek penelitian, dalam penentuan masyarakat sebagai subyek penelitian

menggunakan tehnik *sampling insidental*, yaitu tahnik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. (Sugiyono, 2003:90)

Objek penelitian adalah tingkat keberhasilan pelaksanaan progam pembangunan pemberdayaan, di lingkungan Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang subjek dan objek penelitian. Penulis menyadari bahwa dalam menentukan subjek dan objek penelitian sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan penulis. Selain itu subjek dan objek penelitian harus lah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

2. Pemahaman Masyarakat Mengenai Pemberdayaan dalam Pembangunan

Berdasarkan penelitian dilapangan, kurang pemahaman masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat mandiri yang menggunakan berbagai sumber dana, mulai dari dana alokasi desa, dan dana ibah dari kecamatan yang di berikan kepada masyarakat untuk keperluan pembangunan yang di perlukan di daerah yang sangat membutuhkan, umumnya di Desa Balai

Pinang, dan khususnya di tiga (3) Dusun di Desa Balai Pinang yaitu Dusun Pendaun, Dusun Balai, dan Dusun Kayu Bunga. kurangnya pemahaman disebabkan karena sumber daya manusia (SDM) yang masih sangat rendah, penduduk Desa Balai Pinang lebih banyak yang hanya lulusan SD dibandingkan lulusan SMP dan SMA, dan bahkan 212 jiwa atau 5% jumlah penduduk tuna aksara. Em Zul, dkk (2008:607-608) mengatakan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami. Dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sangat berdampak terhadap pemahaman masyarakat mengenai apa yang harus difhatnya, dan apa yang harus dikerjakan oleh orang lain atau kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa.

Sedangkan Bloom Benyamin, (1975:89) mengatakan bahwa pengertian pemahaman mencakup tujuan, tingkah laku, atau tanggapan mencerminkan sesuatu pemahaman pesan tertulis yang termuat dalam satu komunikasi. Sehingga dalam segala hal dengan mudah untuk dipahami dan di mengerti.

Sehingga dalam segala hal dengan mudah sosialisasi dari pemerintah Desa, karena rapat selalu dilaksanakan dikantor Desa. Masyarakat lebih mementingkan pekerjaanya masing-masing di bandingkan kepentingan kelompok.

Selain faktor kurangnya sosialisasi pemerintah Desa kesetiap Dusun, namun juga karena faktor kemiskinan, masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarga dibandingkan untuk kepentingan bersama di masyarakat, sehingga tidak ada waktu untuk masyarakat mengikuti kegiatan-kegiatan di Desa. Hal tersebut sangat berpengaruh dengan interaksi masyarakat antara satu dengan yang lainnya. Hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa, mengatakan bahwa:

“memang pemberdayaan masyarakat mandiri tersebut kurang disosialisasikan kepada masyarakat karena memang rapat selalu dilaksanakan di kantor Desa selain itu setiap rapat yang dilaksanakan masyarakat tidak banyak yang hadir dan yang aktif mengikuti rapat hanya orang-orang penting dikampung seperti Staf Desa, anggota BPD dan kepala Dusun, maka masyarakat kurang paham dengan pemberdayaan tersebut”. (Wawancara pada tanggal 18 Nopember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa pemberdayaan masyarakat mandiri kurang di sosialisasikan oleh pemerintahan desa setempat, sehingga masyarakat yang mengikuti rapat yang dilaksanakan di kantor Desa yang hadir selalu sedikit dan yang dominan hadir

merupakan staf desa, anggota BPD dan kepala Dusun Serta RT setempat.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Dari Dalam

Setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menanggapi suatu hal. Begitu juga dengan kemampuan setiap orang dalam memahami segala sesuatu yang dilihat dan yang didengarnya., semua tergantung pada kemampuan masing-masing masyarakat dan tergantung minat serta keinginannya untuk mengetahuinya. Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia pemahaman adalah suatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar Chaniago. (2002:427-428). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman tersebut yaitu:

a) Usia

Semakin tua usia seseorang maka proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada usia tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berumur belasan tahun. Selain itu Ahmadi (2001:201) juga mengemukakan bahwa memang daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur. Pemahaman masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat mandiri di Desa Balai Pinang tidak

berpengaruh pada usia seseorang atau masyarakat.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, bahwa masyarakat yang berusia 18-69 tahun berjumlah atau 62% penduduk yang tidak memahami pemberdayaan masyarakat mandiri. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pemerintah Desa mensosialisasikan Program tersebut kepada masyarakat. Adapun rapat yang sifatnya sosialisasikan pemberdayaan masyarakat mandiri tersebut namun selalu dilaksanakan di kantor Desa dan belum pernah disosialisasikan di setiap Dusun atau RT di seluruh Dusun yang ada di Desa Balai Pinang.

Masyarakat jug mengakui bahwa merka malas mengikuti setiap rapa yang diadakan di kantor Desa, karena selain lokasinya jauh dari rumah dan kebanyakan masyarakat tidak punya waktu untuk mengikuti rapat tersebut, selain itu masyarakat juga sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Dalam hubungan itu, seorang informan yang menyatakan bahwa:

“saya tidak paham dengan pemberdayaan masyarakat mandiri yang menyertai pembangunan di dalam masyarakat tersebut dan saya juga tidak pernah menghadiri setiap rapat yang diadakan di kantor Desa, walaupun ada waktu tapi saya malas ikut” (wawancara pada tanggal 19 Nopember)

Wa wawancara yang dilakukan dengan informan tersebut dapat di nyatakan bahwa masyarakat masih kurang memahami pemberdayaan dalam pembangunan, selain itu masyarakat kurang terlibat dalam setiap rapat yang dilaksanakan kerana selain masyarakat tidak memiliki waktu untuk mengikuti rapat namun masyarakat juga merasa malas untuk mengikuti rapat tersebut.

Demikian juga yang disampaikan oleh informan yang mengemukakan bahwa:

“saya belum paham dengan pemberdayaan masyarakat mandiri, saya juga tidak pernah ikut rapat walaupun saya tahu bahwa ada rapat di kontor Desa, saya piker hal-hal yang seperti itu cukup orang-orang yang penting di Desa saja yang ngurusnya” wawancara pada tanggal 19 Nopember 2015)

Berdasarkan pernyataan informan sebagaimana tersebut dapatlah dinyatakan usia bukan penghambat masyarakat dalam memahami tentang pemberdayaan masyarakat mandiri, namun niat dari masyarakat itu sendiri mau atau tidaknya untuk mencari tahu, selain itu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat mandiri karena pemerintah Desa kurang dalam mensosialisasikan pemberdayaan masyarakat mandiri kepada masyarakat.

b) Pengalaman

Selain faktor usia, pengalaman merupakan sumber pemahaman atau pengalamann itu suatu cara untuk memperoleh memperoleh kebenaran pemahaman. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu. Masyarakat yang belum memiliki pengalaman lebih sulit dalam memahami segala sesuatu yang dilakukan oleh orang lain maupun segala sesuatu yang terjadi dilingkungan masyarakat.

Masyarakat di Desa Balai Pinag cenderung bergantung pada staf Desa untuk melaksanakan pembangunan sehingga Desa tidak bisa maju dengan cepat. Kurangnya pengalaman masyarakat di Desa Balai Pinang karena masyarakat kurang bergaul dengan masyarakat luar dan kurang berinteraksi dengan orang-orang yang berpengalaman dalam hal-hal pembangunan.

c) Jenis Kelamin.

Menurut Michael (dalam Sudaryanto 2009:29) mengatakan bahwa ada perbedaan antara otak laki-laki dan otak perempuan. Secara garis besar perbedaan yang dilakukan dalam buku tersebut adalah pusat memori pada otak

perempuan lebih besar dari otak laki-laki, akibatnya kaum perempuan memiliki daya ingat yang kuat dari laki-laki dalam menerima atau mendapat informasi dari orang lain, sehingga mempunyai pemahaman cepat di bandingkan laki-laki. Namun berbeda halnya dengan perempuan yang ada di Desa Balai Pinang karena faktor pendidikan yang rendah maka pemahaman masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat mandiri sangat kurang. selain itu faktor kurangnya pemerintah Desa dalam mensosialisasikan program pemberdayaan tersebut. Adapun beberapa masyarakat yang memahami program pemberdayaan tersebut itu mendapat informaaasi dari kawannya yang mengerti namun tidak memahami sepenuhnya pemberdayaan masyarakat mandiri.

Pemahaman masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki juga masih sangat kurang terhadap pemberdayaan masyarakat mandiri, hal tersebut karena sebagian masyarakat memang sangat malas ikut terlibat dalam kepentingan umum yang ada di Desa, dan faktor kurangnya waktu dari staf desa juga, untuk mensosialisasikan pemberdayaan masyarakat mandiri tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat yang suka mengikuti setiap rapat saja yang memahaminya.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Dari Luar

Berdasarkan penelitian dilapangan terdapat faktor penghambat pemahaman masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat mandiri. faktor yang menghambat pemahaman adalah:

a) Pendidikan

Rendahnya pendidikan masyarakat merrucu kurang pemahaman masyarakat akan suatu hal apapun. Notoadmojo (2007:302) mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses pembelajaran untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu sehingga sasaran pendidikan itu dapat berdiri sendiri. Sedangkan pendapat Wied Rary (2006:412) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pemahaman yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang semakin baik pula pemahamannya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang di miliki penduduk Desa Balai Pinang sangat berpengaruh dengan pemahaman masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat mandiri, Masyarakat Desa Balai Pinang lebih banyak yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dibandingkan dengan masyarakat yang

lulusan SMP atau SMA. Berdasarkan data yang peneliti peroleh bahwa masih terdapat yang tuna aksara. Hal ini sangat jelas menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat mandiri tersebut.

b) Pekerjaan

Jenis pekerjaan yang ditekuni oleh masyaakat di Desa Balai Pinang adalah petani (ladang). pekerjaan ini sangat menyita waktu masyarakat karena bila musim ladang pada pagi hari sudah beraktivitas dengan benar pulang pada siang atau sore hari, sehingga bila mana di undang waktu rapat mereka tidak datang itu karena mash merasa letih.

Humam (2003:212) mengatakan bahwa pekerjaan memang secara tidak langsung pekerjaan turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan, sedangkan interaksi sosial dan budaya berhubungan erat dengan proses pertukaran informasi, hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.. Dengan kesibukan masyarakat dalam bekerja membuat masyarakat sulit mendapat informasi yang ada di masyarakat, termasuklah informasi mengenai pemberdayaan masyarakat mandiri.

c) Informasi

Berdasarkan pengamatan di lapangan ternyata informasi merupakan faktor penghambat pemahaman masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat mandiri. Masyarakat mendapat informasi tentang pemberdayaan masyarakat mandiri tersebut hanya dari teman. Hal ini menandakan bahwa pemberdayaan masyarakat mandiri di desa ini kurang disosialisasikan kepada masyarakat, walaupun sosialisasi dilaksanakan hanya di kantor desa ketika akan dilaksanakan perencanaan pemberdayaan masyarakat mandiri tersebut. Berdasarkan pengamatan jumlah masyarakat yang menghadiri rapat sangat sedikit dan yang sangat aktif mengikuti setiap rapat yang diadakan yaitu Staf-staf Desa, Anggota BPD, dan kepala Dusun. Berdasarkan pendapat Wied Hary (2006:643), mengatakan bahwa informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio atau surat kabar maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

Selain pemberdayaan masyarakat mandiri ini kurang disosialisasikan kepada masyarakat, namun masyarakat juga kurang mendapat informasi dari

media karena di Desa Balai Pinang masyarakat hanya memiliki radio dan TV, namun hanya beberapa kepala keluarga yang memiliki radio dan TV tersebut di setiap Dusun maupun RT. Masyarakat Desa Balai Pinang selain belum memiliki jaringan komunikasi yang baik namun listrik juga belum masuk ke Desa sehingga masyarakat menghidupkan TV pada malam hari saja. Dalam hal ini sebagaimana diungkap anggota BPD yaitu:

"Belum ada pemberdayaan masyarakat mandiri itu disosialisasikan di kampung-kampung, karena rapat selalu dilaksanakan di kantor Desa dan masyarakat yang hadir juga sedikit, masyarakat tahu pemberdayaan tersebut hanya dari teman yang sering mengikuti rapat sehingga masyarakat belum paham program tersebut". (Wawancara pada tanggal 19 Nopember 2015).

D. REFERENSI

1. Buku-Buku:

Anwas. Oos M: 2013. *pemberdayaan masyarakat di era global*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Badaruddin. 2006. *Modal Sosial dan Pengembangan Model Transmisi Modal Sosial dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi pada Tiga Komunitas Petani Karet di*

Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat). Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi, Dikti.

Giarci, G.G. 2001. *Caught in Nets : A Critical Examination of the use of the concept of "Network" in community Development Studies*. *Community Development*. Journal Vol. 36 No.1 januari 2001 pp 63-71, Oxford University Press. Diakses 19 februari 2013.

Holil, Soelaiman (1980). *Partisipasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Pustaka Prima.

Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partipatoris Berbasis Aset Komunitas Dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok FISIP UI Press.

Jim Iffe (2008) *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Koentjaraningrat, 2002. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.

Lisdiana. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Pada Pukesmas Parit Haji Husein II Kecamatan Pontianak*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Nas Dian FT. 2006. *Pengembangan Masyarakat (Community Development)*. Bogor (ID): Bagian Sosiologi pedesaan dan Pengembangan Masyarakat Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor

Mikelsen, Britha. (Penerjemah Methoes Nalle). 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Poerwadarminta, W.J.S. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Sari, Antonia. 2012. *Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pencegahan Penyakit Malaria di Desa Serawai Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang*. Sikripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

..... 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sin Singarimbun M. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta (ID): PT Pustaka LP3ES Indonesia

Suharto E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat "Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial"*. Bandung (ID): PT Refika Aditama

Wia Wicaksono. 2010. *Analisis Tingkat Partisipasi Warga Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* (Studi Kasus: PT Isuzu Astra Motor Indonesia Assy Plant Pondok Ungu). [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Silfanus Effendi
 NIM / Periode lulus : E.1111.2004 / 11
 Tanggal Lulus : 29 Februari 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Sosiologi / Pembangunan Sosial
 E-mail address/ HP : silfanus@ yahoo.com 0812-5665-1439

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *Sociology* (*) pada Program Studi *Pembangunan sosial* Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Partisipasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat mandiri di desa balai pinang kecamatan simpang hulu Kabupaten Ketapang.

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara fulltext
- content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : maret 2016

Silfanus Effendi
 Silfanus Effendi
 NIM. E.1111.2004

Catatan :
 *tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)